



Diskominfo
KOTABANDUNG



LAPORAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA BANDUNG TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Kata Pengantar	1
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
1. Pendahuluan	3
2. Latar Belakang Keterbukaan Informasi Publik	5
3. Landasan Hukum	6
4. Maksud Dan Tujuan	8
5. Hakekat Pelayanan Informasi Publik	8
6. Asas Pelayanan Informasi Publik	8
7. Kelompok Pelayanan Informasi Publik	9
8. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik	9
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
1. Kedudukan PPID	10
2. Tugas dan Fungsi	11
3. Mekanisme Pengumpulan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi	12
a. Pengumpulan Informasi	12
b. Pengklasifikasian Informasi	13
c. Pendokumentasian Informasi	16
d. Pelayanan Informasi	17
4. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	20
5. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik	24
6. Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik	25
7. Penyelesaian Sengketa Informasi	25
8. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	26
9. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	27
10. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan	29
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	34
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	34
2. Grafik Permohonan Informasi Publik	35
3. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan	35
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya	36
5. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta Alasannya	37

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	37
1. Jumlah Keberatan	38
2. Tanggapan Atas Keberatan Dan Pelaksanaannya	39
3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Jawa Barat	40
4. Hasil Mediasi Dan/Atau Keputusan Ajudikasi	41
5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan	42
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik	42
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	42
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	43
G. PENUTUP	44
H. LAMPIRAN	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	10
Gambar 2. Laman Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) I	20
Gambar 3. Laman Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) II	20
Gambar 4. Desk Layanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	20
Gambar 5. Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	21
Gambar 6. Tenant Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	21
Gambar 7. Laman website PPID Utama Kota Bandung I Kota Bandung I	22
Gambar 8. Laman website PPID Utama Kota Bandung I Kota Bandung II	22
Gambar 9. Layanan Via Media Sosial Fanpage Facebook PPID Kota Bandung	22
Gambar10. Layanan Via Media Sosial Twitter PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	23
Gambar11. Layanan Via Media Sosial Instagram PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	23
Gambar12. Layanan Via Channel Youtube PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	24
Gambar13. Kontrak Tenaga Ahli PPID Utama Pemerintah Kota Bandung	28
Gambar14. Kegiatan Bimtek PPID Pembantu di Ciwidey I	29
Gambar15. Kegiatan Bimtek PPID Pembantu di Ciwidey II	29
Gambar16. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek MONEV PPID Pembantu Tahun 2023	30
Gambar17. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek MONEV PPID	30
Gambar18. Penyerahan Penghargaan Monev PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan	31
Gambar19. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan E-Monev oleh Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2023	31

Gambar20. Penerimaan Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2023	32
Gambar21. Sosialisasi dan Edukas Publik terkait PPID Kota Bandung melalui media cetak Koran Gala	33

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok manusia dan hak untuk mendapatkan informasi publik adalah Hak Asasi Manusia. Untuk itu dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, sebagai wujud penerapan dari undang-Undang tersebut.

PPID Utama Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan PPID Utama Kota Bandung adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bandung.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara, maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Utama Kota Bandung terus berusaha untuk meningkatkan keterbukaan Informasi Publik.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandung ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Bandung dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Bandung, 30 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung,
Selaku PPID Utama



A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pendahuluan

Saat ini keterbukaan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Kepercayaan ini dapat timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini, keterbukaan informasi dianggap penting bagi sebagian orang saja, sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang memperdulikan hal tersebut. Kesadaran masyarakat perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap undang-undang keterbukaan informasi, tetapi pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah. Dengan demikian akan tercipta *good governance*.

Good governance akan terwujud bila terciptanya dua kekuatan saling mendukung antara masyarakat yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersamaan dengan adanya pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warganya. Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat harus dapat menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang pemerintahan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik/UU KIP) adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan maupun di tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selanjutnya di Tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 dan Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pelayanan publik berbasis elektronik membutuhkan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah/Kota dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Dengan adanya SPBE ini diharapkan pelayanan informasi di Pemerintahan Kota Bandung dapat terlaksana dengan cepat, tepat waktu, bebas biaya/ biaya ringan dan dengan cara sederhana. Sehingga implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Bandung dapat terlaksana dengan baik.

2. Latar Belakang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik dan partisipasi warga dalam kebijakan publik di Indonesia telah mendapat ruang yuridis formal sebagaimana dapat dicermati pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP).

UU KIP kemudian dilengkapi dengan keberadaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Menurut UU KIP salah satu tujuan Undang-Undang ini adalah “meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas” (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3, bagian g).

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

3. Landasan Hukum

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Utama Kota Bandung berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010 dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Utama Kota Bandung untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya.

UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Utama Kota Bandung untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Dasar hukum pelaksanaan PPID utama pada pemerintah Kota Bandung:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
- b. Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- c. 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- i. Keputusan Walikota Bandung Nomor 487 / Kep.2491.Diskominfo / 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- k. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Laporan ini sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung) dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.



2. Tujuan

- a. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
- b. Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kota Bandung;
- d. Memberikan motivasi/pendorong bagi unit pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan;
- e. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

5. Hakekat Pelayanan Informasi Publik

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan secara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

6. Asas Pelayanan Informasi Publik

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

7. Kelompok Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kelompok pelayanan jasa yang menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

8. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.



MAKLUMAT PELANAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGADUAN

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan pengaduan dengan sungguh-sungguh untuk dapat:

1. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan yang cepat dan tepat waktu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan tugas, fungsi dan kewenangan PPID Utama dan Pengelola SIPAN-LAPOR! Pemerintah Kota Bandung
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dalam menyampaikan pengaduan
7. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang tertata baik
8. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan pengaduan serta keakuratan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
9. Menyiapkan petugas informasi dan pengaduan yang berdedikasi dan siap melayani

Bandung, 1 September 2022
PPID Utama Kota Bandung

T. Ahmad Briyana, S.Sos., M.Si

Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kedudukan PPID

Kedudukan dan Penunjukan PPID Pemerintah Kota Bandung:

1. PPID Pemerintah Kota Bandung berkedudukan/Sekretariat di
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.
3. PPID Pemerintah Kota Bandung ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung.
4. Ketua PPID Pemerintah Kota Bandung adalah Kepala Dinas
5. Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu/OPD:
 - a. PPID Pembantu/OPD berkedudukan di Satuan Kerja masing masing.

- b. PPID Pembantu/OPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung.
- c. Ketua PPID Pembantu/OPD adalah Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kedudukan dan Penunjukan PPID Sub Pembantu:

- a. PPID Sub Pembantu berkedudukan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- b. PPID Sub Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- c. Ketua PPID Sub Pembantu adalah Petugas yang ditunjuk oleh pihak sekolah berdasarkan surat perintah.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Dan Fungsi PPID Pemerintah Kota Bandung

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi Badan/Dinas/OPD/BLUD/BUMD/Satua Kerja Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung (*link/online* dan *offline*);
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
- d. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

Tugas Dan Fungsi PPID Pembantu/OPD

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.

Fungsi:

- a. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya;
- b. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;

- c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

3. Mekanisme Pengumpulan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi

a. Pengumpulan Informasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah:

1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing OPD.
3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan.
5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
 - b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya;
 - c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
 - d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

6. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi:
 - a. Organisasi/Kelembagaan;
 - b. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
 - c. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
 - d. Program dan Kegiatan;
 - e. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan;
 - f. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT);
 - g. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
 - h. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
 - i. Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
 - j. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

b. Pengklasifikasian Informasi

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

Informasi yang Bersifat Publik

Dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- a. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
 - 1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;

- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.
 - 2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.
 - 3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik.
 - 4) Informasi mengenai pengusuran lahan, seperti pengusuran lahan untuk kepentingan umum.
 - 5) Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.
- 2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Pemerintah Kota Bandung, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.
- 3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.
- 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
- 5) Informasi yang lebih detail atas permohonan pemohon.
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
- 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kota Bandung; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
 - 2) Hasil keputusan Pemerintah Kota Bandung dan latar belakang pertimbangannya;
 - 3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di OPD;
 - 4) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat dan/atau dibaca di OPD;
 - 5) Perjanjian Pemerintah Kota Bandung dengan pihak ketiga;

- 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kota Bandung dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- 7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 4, Pasal 6, pasal 17 dan 18.
- b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:
 - 1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan objektivitas.
 - 2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subjektif dan kesewenang-wenangan.
 - 3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaknya.
- c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
- d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.

- e. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- f. Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh OPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
- g. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

c. Pendokumentasian Informasi

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk membantu PPID melayani permohonan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

1. Deskripsi Informasi:
Setiap OPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.
2. Verifikasi Informasi:
Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.
3. Otentikasi Informasi:
Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja.
4. Kodefikasi Informasi:
 - a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi.
 - b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing satuan kerja.
5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.

d. Pelayanan Informasi

■ Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik desk layanan PPID Pemerintah Kota Bandung yang bertempat di (Mal Pelayanan Publik Kota Bandung dan melalui Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK/<https://ppid-simonik.bandung.go.id/>)). Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik pada desk layanan PPID Pemerintah Kota Bandung dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Sementara itu Pelayanan Informasi Publik melalui SIMONIK dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat selama 24 jam.

■ Mekanisme Permohonan dan Pelayanan Informasi Publik

PPID Kota Bandung memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, melalui layanan online Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK/<https://ppid-simonik.bandung.go.id/>), media sosial dan *website* (www.ppid.bandung.go.id):

a. Layanan informasi melalui SIMONIK, yaitu layanan permohonan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi mengunjungi laman <https://ppid-simonik.bandung.go.id/> dan memilih klasifikasi pemohon informasi. Selanjutnya mengisi form permohonan informasi dan melengkapi persyaratan permohonan informasi. Untuk permohonan informasi secara perorangan dapat mengisi formulir permohonan dan mengunggah foto KTP, bagi kelompok berbadan hukum dapat mengunggah akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM), surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Pemerintah Kota Bandung/setempat, surat keterangan domisili, serta AD/ART lembaga publik/ormas. Sementara untuk Kelompok tak berbadan hukum dapat mengunggah foto KTP

dan dokumen pendukung. Tujuan permohonan informasi harus jelas penggunaannya/logis serta materi atau informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.

2. Pemohon Informasi akan mendapatkan nomor tiket permohonan informasi. Nomor tiket permohonan informasi tersebut juga bisa digunakan untuk memeriksa status permohonan informasi beserta dengan memasukan nomor KTP (identitas)
 3. Petugas memproses permohonan dari pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik
 4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik).
 6. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.
- b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala melalui *website* ppid.bandung.go.id atau *website* masing-masing SKPD dan media cetak yang tersedia dan media sosial PPID Kota Bandung (instagram, facebook, twitter, dan Youtube)

■Jangka Waktu Penyelesaian

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permohonan dari pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara online, disampaikan melalui Aplikasi SIMONIK atau melalui email pemohon dengan melampirkan berita acara penerimaan informasi publik.
- d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, dalam bentuk *hard copy* atau data tertulis. Apabila dibutuhkan biaya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permohonan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

■Biaya/Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/*fotocopy* sendiri di sekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

4. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pelayanan permohonan informasi PPID Kota Bandung dilakukan melalui SIMONIK dan desk layanan secara langsung, yang didukung oleh *front office* dan *back office*:

a. Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK)

<https://ppid-simonik.bandung.go.id/>



Gambar 2. Laman Aplikasi Permohonan Informasi I



Gambar 3. Laman Aplikasi Permohonan Informasi II

b. Front Office, meliputi:

> Desk Layanan Langsung



Gambar 4. Desk Layanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung



Gambar 5. Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung



Gambar 6. Tenant Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung Jl. Cianjur No.34 Bandung

c. Back Office, meliputi:

- > Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- > Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- > Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

d. Website dan Media Sosial

1. Website PPID Kota Bandung: <https://ppid.bandung.go.id/>



Gambar 7. Laman website PPID Utama Kota Bandung I



Gambar 8. Laman website PPID Utama Kota Bandung II

2. Akun Fanpage Facebook:

PPID Kota Bandung

(<https://www.facebook.com/ppidutamakotabandung>)



Gambar 9. Layanan Via Media Sosial Fanpage Facebook PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

3. Akun Twitter:

@ppidkotabandung (<https://twitter.com/ppidkotabandung>)



Gambar 10. Layanan Via Media Sosial Twitter PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

4. Akun Instagram:

Ppidlaporkotabandung

(<https://www.instagram.com/ppidlaporkotabandung/>)



Gambar 11. Layanan Via Media Sosial Instagram PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

5. Channel Youtube: PPID Kota Bandung



Gambar 12. Layanan Via Channel Youtube PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

6. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik

Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi (Badan Publik) membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya PPID Pemerintah Kota Bandung setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung selaku atasan PPID Pemerintah Kota Bandung.

Laporan tersebut memuat informasi mengenai permohonan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permohonan yang belum dipenuhi, penolakan permohonan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Keberatan Informasi Publik

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

7. Penyelesaian Sengketa Informasi

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
 - b. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
 - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
 - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
2. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
 - a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;

- b. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
 - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
 - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
3. Penyelesaian sengketa informasi
- a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
 - b. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
 - c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID Provinsi melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

8. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Rincian Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Kota Bandung:

- a. Bimbingan Teknis terkait Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat Kota Bandung bagi para PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023
- b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan serta SP4N-LAPOR di Wilayah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023
- c. Rapat Koordinasi Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat oleh Komisi Informasi
- c. Menerima konsultasi tentang keterbukaan informasi publik dari para PPID Pembantu;
- d. Memberikan pendampingan sengketa informasi publik kepada PPID Pembantu;
- e. Menerima kunjungan kerja dan studi banding dari Kota/ Kabupaten tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Menerima Pemohon Informasi Publik dari masyarakat melalui SIMONIK PPID Kota Bandung atau secara langsung melalui desk layanan informasi;
- g. Memberikan informasi publik kepada masyarakat;
- h. Memberikan sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui media Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube.

9. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata Komputer.

Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. Petugas Pelayanan Informasi terdiri dari: Tenaga Ahli Arsiparis, Tenaga Ahli Humas dan Tenaga Ahli Ilmu Komputer yang masing-masing terdiri dari 2 Orang. Berikut Surat Kontrak Tenaga Ahli:





Gambar 13. Kontrak Tenaga Ahli PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

10. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan

a. Anggaran

Anggaran Tahun 2023 yang disediakan dalam mendukung pelaksanaan Layanan Informasi sebesar : Rp.3.479.653.650.

1. Bimbingan Teknis Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat Kota Bandung Bagi Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023, tanggal 2-3 Maret 2023 yang bertempat di Ciwidey Valley Resort, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.



Gambar 14. Kegiatan Bimtek PPID Pembantu di Ciwidey I



Gambar 15. Kegiatan Bimtek PPID Pembantu di Ciwidey II

2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Undang-undang Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan di Wilayah Kota Bandung Tahun 2023, tanggal 16 Mei 2023, yang bertempat di Bandung Command Center (BCC) melalui Zoom Meeting.



Gambar 16. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek MONEV PPID Pembantu Tahun 2023

1. Sosialisasi Masa Sanggah Monev PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan, serta SP4N-LAPOR! di Wilayah Kota Bandung Tahun 2023, tanggal 28 Juli 2023, bertempat di Bandung Command Center (BCC) melalui Zoom Meeting.



Gambar 17. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek MONEV PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan Tahun 2023

2. Penyerahan Penghargaan Monev Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan serta SP4N-LAPOR di Wilayah Kota Bandung Tahun 2023, yang bertempat di Plaza Balai Kota Bandung, bertepatan dengan Hari Jadi Kota Bandung ke-213 pada 25 September 2023.



Gambar 18. Penyerahan Penghargaan Monev PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan

3. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan E-Monev Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Oleh Komisi Informasi Tahun 2023, yang bertempat di Gedung Rosada , pada tanggal 9 Agustus 2023.



Gambar 19. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan E-Monev oleh Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2023

4. Penerimaan Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 30 November 2023.



Gambar 20. Penerimaan Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

5. Media Cetak

Media cetak yang berfungsi sebagai mediator edukasi publik secara luas. Melalui media ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih terbuka kepada publik tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan segala kendala dan tantangan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik dari masyarakat.



Gambar 21. Sosialisasi dan Edukas Publik terkait PPID Kota Bandung melalui media cetak Koran Gala

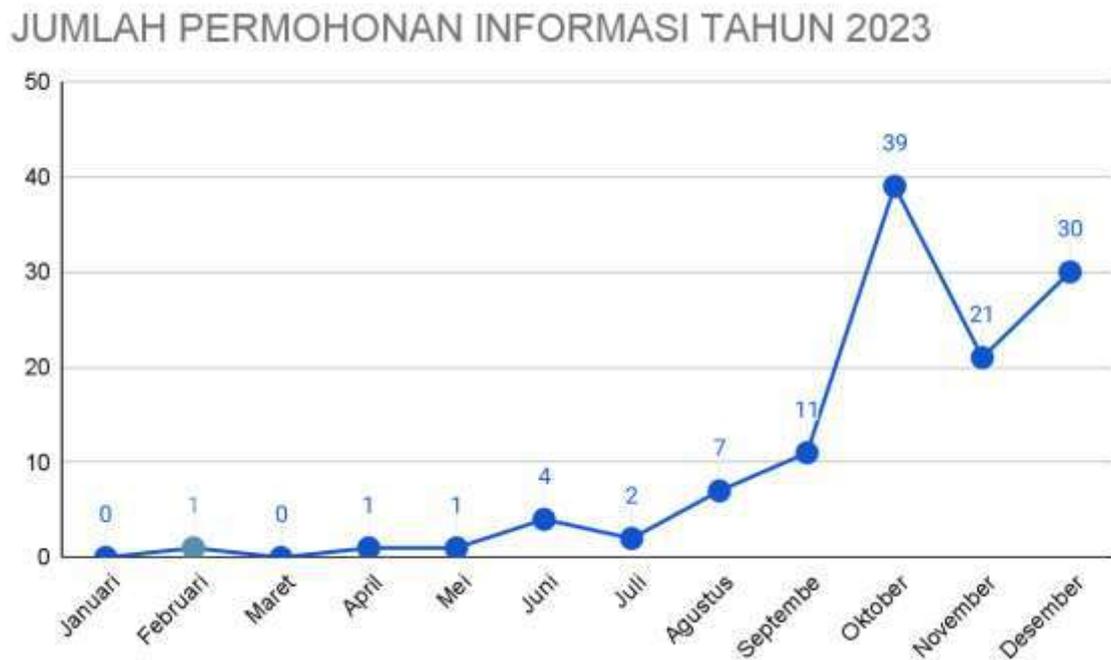
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari 2023	0
2	Februari 2023	1
3	Maret 2023	0
4	April 2023	1
5	Mei 2023	1
6	Juni 2023	4
7	Juli 2023	3
8	Agustus 2023	7
9	September 2023	11
10	Oktober 2023	39
11	November 2023	21
12	Desember 2023	30
	TOTAL	118

NO	JENIS PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH PEMOHON	KETERANGAN
1	Perorangan	115	Mahasiswa, Pelajar, Pegawai BUMN, Pegawai Swasta, Wiraswasta, Perawat, Pensiunan, PNS
2	Kelompok Berbadan Hukum	3	LSM
3	Kelompok Tidak Berbadan Hukum	-	-

2. Grafik Permohonan Informasi Publik



Gambar 22. Grafik Garis Permintaan Informasi Publik per Januari 2023 s.d. Desember 2023

3. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

KLASIFIKASI INFORMASI	WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN
Informasi Berkala	1-10 Hari Kerja
Infomasi Setiap Saat	6-17 Hari Kerja
Informasi Serta Merta	1 Hari kerja
Informasi Yang Dikecualikan	1 Hari Kerja

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

NO	BULAN	STATUS DIKABULKAN SELURUHNYA	STATUS DIKABULKAN SEBAGIAN
1	Januari 2023	-	-
2	Februari 2023	-	-
3	Maret 2023	-	-
4	April 2023	-	-
5	Mei 2023	-	-
6	Juni 2023	3	-
7	Juli 2023	3	-
8	Agustus 2023	5	-
9	September 2023	11	-
10	Oktober 2023	39	-
11	November 2023	18	-
12	Desember 2023	23	-
	TOTAL	102	-

6. Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak Beserta Alasannya

Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 14 permohonan, alasan penolakan tersebut dikarenakan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan; tidak dikuasai, dan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Keberatan

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari 2023	
2	Februari 2023	
3	Maret 2023	1
4	April 2023	
5	Mei 2023	
6	Juni 2023	1
7	Juli 2023	
8	Agustus 2023	
9	September 2023	
10	Oktober 2023	
11	November 2023	
12	Desember 2023	1
	TOTAL	3

2. Tanggapan Atas Keberatan Dan Pelaksanaannya

NO	NAMA PEMOHON	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	HASIL PELAKSANAAN
1.	Aliansi Pengurus Indonesia Jaya (APIJ)	Diberikan Jawaban atas keberatan	<p>PPID Utama mengadakan Rapat Koordinasi dengan Inspektorat, BKAD, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Bagian Tata Pemerintahan Setda.</p> <p>Hasil keputusan: Untuk Bantuan Langsung Program, Kartu Sembako BNPT PPKM atau Bansos Usulan Daerah, Kartu Sembako BNPT Regular dan Program Keluarga Harapan (PKH); secara program, kegiatan, dan data bukan merupakan kewenangan Dinas Sosial Kota Bandung, dan Dinas Sosial Kota Bandung tidak memiliki kuasa atas data tersebut. Kewenangan program dan data berada di bawah Kementerian Sosial.</p> <p>Untuk Bantuan sembako kemiskinan ekstrem dalam hal ini Kota Bandung tidak mendapatkan bantuan sembako kemiskinan ekstrem.</p>
2.	Aliansi Pengurus Indonesia Jaya (APIJ)	Diberikan Jawaban atas keberatan	<p>Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan merupakan program yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap program tersebut telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial setiap tahunnya. Proses penyaluran bantuan sosial PKH di Kota Bandung dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama masing-masing penerima bantuan sosial PKH. Adapun Dinas Sosial hanya melakukan monitoring pada saat penyaluran dan tidak menguasai data yang dimaksud</p>

3.	Aliansi Pengurus Indonesia Jaya (APIJ)	Diberikan Jawaban atas keberatan	Berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah permohonan informasi yang dimaksud terkait Pajak PBB dan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah termasuk dalam Informasi Yang Dikecualikan (DIK). Terkait permohonan informasi lainnya merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan.
----	--	----------------------------------	---

Bukti Tanggapan Atas Keberatan:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciumes, Sumur Bandung, Kota Bandung
 Jawa Barat 40137 Telp. 02224234793, Fax 02224234793
 e-mail : dakominfo@bandung.go.id

Bandung, 13 Desember 2023

Nomor : F/KI/1341-DISKOMINFO/XII/2023 Kepada
 Sifat : Penting Yth. Ketua Umum Perkumpulan
 Lampiran : Aliansi Perhuli Indonesia
 Hal : Tanggapan Permohonan Keberatan Jaya (APJI)
 Informasi

Di Bandung

Dipernakandikan dengan hormat, sehubungan dengan adanya permohonan informasi yang diajukan oleh Perkumpulan Aliansi Perhuli Indonesia Jaya (APIJ) pada tanggal 13 November 2023 dengan nomor 176.PRM.2023-11-13 perihal Permohonan Informasi mengenai **Putang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Putang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Biaya Pencegahan dan/atau Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2022 dan 2021** dan permohonan keberatan atas permohonan informasi pada tanggal 6 Desember 2023 dengan alasan permintaan informasi tidak dipenuhi dan status ditolak dalam sistem tidak dipahami serta tidak menyebutkan alasannya.

Kami selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bandung menyampaikan hal berikut:

- Terkait surat keberatan poin 1-3 kami informasikan bahwa sebelumnya Aplikasi Permohonan Informasi (SIMONIK) PPID Kota Bandung sempat mengalami masalah, sehingga jwobon kami atas permohonan informasi dengan tiket pendaftaran: 176.PRM.2023-11-13 tidak tersampaikan. Namun sejak 8 Desember 2023 SIMONIK PPID Kota Bandung sudah kembali normal.
- Terkait surat keberatan poin 4 kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah permohonan informasi yang dimaksud terkait Pajak PBB dan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan (DIK). Terkait permohonan informasi lainnya merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi lainnya pemohon dipersalahkan mengakses transparansi keuangan pada website <https://www.bandung.go.id/etelusa/9/transparansi-keuangan/>

KEPALA DINAS KUMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Vayan Ahmad Bilyana, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19731127 199303 1 003

Tembusan:
 Yth: 1. Pj. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 2. Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan);

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Tlp. 4232338 – 4232339 - 4232370 Bandung

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada 9 Mei 2023 dengan nomor pendaftaran 000712-PRM-5/2023, Kami menyampaikan kepada Saudara:

Nama : Aliansi Pengurus Indonesia Jaya (APIJ)
 Alamat : Gedung TOPAD 10 Jl. Jendral Yani (By Pass) Utan Kaya Utara Mairaman Jakarta Timur 13129
 No. Telp./Email : 085932163466 / apij.tspad@gmail.com
 Informasi yang diminta : 1. Bahwa berkaitan keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kesehatan RI besaran Bantuan Sosial PKH ditetapkan sebagai berikut: a. Ibu hamil mendapatkan bantuan Rp 3 juta per 1 tahun; b. Anak usia dini, mendapatkan bantuan Rp 3 juta per 1 tahun; c. Penyandang disabilitas, mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta per 1 tahun; d. Lansia usia atas 70 tahun ke atas, mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta per 1 tahun; e. Pelajar SD/MI/Seberajat, mendapatkan bantuan Rp 900.000 per 1 tahun; f. Pelajar SMP/MTs/Seberajat, mendapatkan bantuan Rp 1,5 juta per 1 tahun; g. Pelajar SMA/MA/Seberajat, mendapatkan bantuan Rp 2 juta per 1 tahun. 2. Bahwa terkait bantuan sosial PKH dimaksud, APIJ berkeinginan atas memperoleh informasi realisasi anggaran PKH tahun anggaran 2021, yang merinci KPM per kategori poin 1a sd 1g untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan Desa/RW atau Setara.

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penggunaan Informasi Publik	<input type="checkbox"/> Keras <input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu ...
2.	Bentuk fisik yang tersedia	<input type="checkbox"/> Softcopy <input type="checkbox"/> Aneka-cara/teknis tertentu
3.	Biaya yang ditanggung	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp. <input type="checkbox"/> Pengiriman Rp. <input type="checkbox"/> Lain-lain Rp. Jumlah Rp.
4.	Waktu penyediaan	... hari kerja
5.	Kami dapat sampaikan terkait permohonan informasi sebagai berikut:	

B. Informasi Tidak dapat diberikan karena:

- Informasi yang diminta tidak dikuasai
- Informasi yang diminta belum diklasifikasikan

Penyalinan informasi yang belum diklasifikasikan dilakukan dalam jangka waktu ... hari kerja

Bandung, 19 Mei 2023
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

TTD

Y. AHMAD BILYANA, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19731127 199303 1 003

4. Hasil Mediasi Dan / Atau Keputusan Ajudikasi

NO	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON	JENIS PUTUSAN	HASIL PUTUSAN	TANGGAL PUTUSAN
1	Tommy Theodorus	Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang	Dokumen peta situasi perencanaan kota dari IMB Benteng	Putusan	Menyatakan bahwa salinan dokumen yang dimohonkan, merupakan informasi yang terbuka untuk Pemohon a quo.	13-07-2023
2	Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ)	Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Sosial Kota Bandung	Anggaran keempat dan Realisasi keempat program-program untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RW/RT. Adapun yang dimaksud ialah program Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako BPNT PPKM/Bansos Usulan Daerah Kartu Sembako BPNT Reguler, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem	Mediasi	Bahwa berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi a quo.	19-09-2023

5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena para pihak menerima putusan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

6. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2023 karena tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka tidak terdapat hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Untuk itulah sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai diberlakukan efektif secara nasional yaitu tanggal 30 April 2010 atau dua tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, maka tidak ada lagi titik untuk kembali bagi Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah untuk mengimplementasi UU KIP ini.

Selaras dengan Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, semua Badan Publik berkewajiban menyampaikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat. Kita harus sikapi positif UU KIP ini, mengingat transparansi informasi adalah untuk kepentingan bersama dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu sebagai Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai penyedia informasi maupun masyarakat sebagai pengguna informasi.

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Di beberapa OPD, belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga menjadikan layanan informasi kepada pemohon kurang optimal.

- 2) Kurangnya sinergi antara pengelola layanan informasi publik di PPID Utama dengan PPID Pembantu.
- 3) Mekanisme layanan untuk unit OPD belum memadai, mengingat batas waktu penyampaian tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja.
- 4) Penerapan sistem *E-Government* di Pemerintah Kota Bandung belum maksimal, sehingga pelayanan informasi publik menjadi belum optimal.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Pembentukan unit organisasi kehumasan dan layanan/pengelola informasi publik bagi OPD yang belum memilikinya.
4. Memaksimalkan sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) sehingga permohonan informasi bersifat satu pintu dan terpusat, serta mewujudkan pelayanan informasi publik yang prima, yaitu lebih cepat, sederhana, dan biaya terjangkau
5. Memaksimalkan penggunaan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) di seluruh PPID Pembantu
6. Pemeliharaan (maintenance) secara rutin website PPID dan SIMONIK

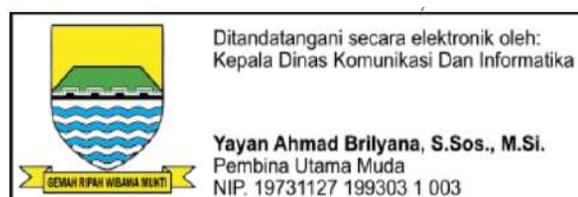
Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi secara maksimal kepada masyarakat, terlebih lagi dengan semakin berkembangnya digitalisasi layanan, masyarakat tentu membutuhkan informasi secara lebih cepat, tepat, transparan dan mudah. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara negara yang baik, Pemerintah Kota Bandung berusaha meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat secara maksimal sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan lebih transparan, efektif, serta bertanggung jawab.

G. PENUTUP

Pemerintah Kota Bandung selaku Badan Publik telah berupaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Upaya yang telah dilakukan selama ini berhasil menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang informatif selama 9 kali berturut-turut. Hal ini merupakan capaian sekaligus tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung untuk selalu memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik.

Demikian laporan ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kota Bandung. Saran dan masukan sangat kami harapkan agar pada tahun-tahun mendatang PPID Pemerintah Kota Bandung dapat lebih meningkatkan kualitas dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Bandung, 30 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bandung,
Selaku PPID Utama



H. LAMPIRAN

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: Januari

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
NIHIL																				

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: Februari

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
000710-PRM/2/2023	24/2/23	Aliansi Pengurus Indonesia Jaya (APLJ)				Anggaran keempat dan Realisasi keempat program-program untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RW/RT. Adapun yang dimaksud ialah program Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako BPNT PPKM/Bansos Usulan Daerah Kartu Sembako BPNT Reguler, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem	APLJ berkeinginan untuk melihat dan mengetahui perbandingan antara yang dianggarkan dengan realisasi keempat program program tersebut diatas.	-	V	-	-	-	-	V	Ditolak	Informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung	1/3/2023	-	Tidak ada	Tidak ada

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: Maret

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		No. Registrasi	
								Dibawah Penguasaan	Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara		
																					Ya
NIHIL																					

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: April

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
000711-PRM/4/2023	3/4/2023	Deska Rachmala			Karyawan BUMN	1) Tahapan tata cara pengajuan sewa lahan milik pemerintah untuk kepentingan bisnis dengan konsep urban farming dan pihak yang bersangkutan. 2) Cara mengetahui daftar lahan pemerintah yang dapat disewakan ke masyarakat. 3) Persyaratan sewa tanah yang tercantum di sosial media Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu surat perjanjian sewa menyewa, bukti jual beli/beli/hibah/penyerahan bangunan, surat kepemilikan bangunan, siapa pihak terkaitnya	Untuk informasi pribadi, untuk melakukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan berlaku	-	V	-	-	-	V	Sedang dalam Proses	-	-	-	Tidak ada	Tidak ada	

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: Mei

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
000712-PRM/5/2023	09/05/23	Aliansi Pengurus Indonesia Jaya (APIJ)				1. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI besaran Bantuan Sosial PKH ditetapkan sebagai berikut: a. Ibu hamil mendapatkan bantuan Rp 3 juta per 1 tahun; b. Anak usia dini, mendapatkan bantuan Rp 3 juta per 1 tahun; c. Penyandang disabilitas, mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta per 1 tahun; d. Lanjut usia atau 70 tahun ke atas, mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta per 1 tahun; e. Pelajar SD/MI/Sederajat, mendapatkan bantuan Rp 900.000 per 1 tahun; f. Pelajar SMP/MTs/Sederajat, mendapatkan bantuan Rp 1,5 juta per 1 tahun; g. Pelajar SMA/MA/Sederajat, mendapatkan bantuan Rp 2 juta per 1 tahun. 2. Bahwa terkait bantuan sosial PKH dimaksud, APIJ berkeinginan untuk memperoleh informasi realisasi anggaran PKH tahun anggaran 2021, yang merinci KPM per kategori poin 1. a s/d 1.g untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan/Desa/RW atau Setara.	Untuk melihat dan mengetahui realisasi bantuan sosial PKH tahun anggaran 2021 dimaksud sebagaimana mestinya.	-	V	-	-	-	V	Ditolak	Informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung	19/5/2023	-	Tidak ada	Tidak ada	

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: Juni

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
71_PRM_2023-06-06	5/6/2023	Muhamad Ali			Mahasiswa	LAKIP DPMP TSP TAHUN 2022	Tugas Kuliah Menyusun LAKIP	-	V	V	V	-	-	V	Diberikan	-	21/6/2023	-	Tidak ada	Tidak ada
72_PRM_2023-06-06	6/6/2023	Santi Nurhunah			Mahasiswa	LKPD AUDITED DAN LRA AUDITED PEMDA KOTA BANDUNG 2017-2021	PENELITIAN TUGAS AKHIR S1							V	Diberikan		26/6/2023		Tidak ada	Tidak ada
000713-PRM/6/2023	8/6/2023	Alden Christopher Benedict			Mahasiswa	Rencana pembangunan RJU tahun anggaran 2023. Data tersebut berupa rincian seluruh lokasi serta jumlah titik PJU yang akan di bangun di wilayah Kota Bandung baik ruas jalan nasional, provinsi ataupun kota. Data PJU maupun Highmast melalui resees ataupun musrenbang.	Untuk mengetahui lokasi yang mendapat pembangunan PJU pada tahun 2023	-	Dinas Perhubungan Kota Bandung	-	V	-	-	V	Sedang dalam proses	-	-	-	Tidak ada	Tidak ada
73_PRM_2023-06-11	11/6/2023	H. Asep Rachmat			Pensiun	daftar KRK online	Untuk mendapatkan Dokumen KRK	-	Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang	-	V	-	-	V	Diberikan	-	21/6/2023	-	Tidak ada	Tidak ada

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: Juli

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi				Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis			Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
								Ya	Tidak												
000714-PRM/7/2023	25/7/2023	Ayi Selasih			Mahasiswa	1. Data Keluarga Miskin Per-Kecamatan di Kota Bandung 2021-2023 2. Data Penerima BPNT Per-kecamatan di Kota Bandung 2021-2023 3. Data Target dan Realisasi Program BPNT Tahun 2017-2023 4. Data Penerima BPNT di Kelurahan Babakan Sari, Babakan Surabaya, Kebon Jayanti, Kebon Kangkung, Sukapura, Cicaheum Tahun 2021-2023	Penelitian Tugas Akhir	V			V			V	Diberikan	-		15/8/ 2023	Tidak ada	Tidak ada	
85_PRM_2023-07-27	27/7/2023	Agni Aulia Rosada			Mahasiswa	LRA Tahun 2018,2019 dan 2020	Untuk Skripsi	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		31/7/2023	Tidak ada	Tidak ada	
86_PRM_2023-07-27	27/7/2023	Yasmin Putri Afifah			Mahasiswa	Data Prevalensi OSCC (Oral Squamous Cell Carcinoma) terbaru/tahun terakhir dibuat	Tugas	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		31/7/2023	Tidak ada	Tidak ada	

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: Agustus

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
87_PRM_2 023-08-02	2/8/2023	Wimpie Fransiscus			Mahasiswa	DIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2023	Tugas analisis Dinas untuk nilai ujian	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	V	-	-	V	Diberikan	-	3/8/2023	-	Tidak ada	Tidak ada
88_PRM_2 023-08-03	3/8/2023	Wimpie Fransiscus			Mahasiswa	Daftar pegawai di DIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2023	Tugas analisis Dinas untuk nilai ujian	-	-	-	V	-	-	V	Ditolak	Informasi tersebut masuk ke dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		4/8/2023	Tidak ada	Tidak ada
89_PRM_2 023-08-07	7/8/2023	Sigit Handoko			BUMN	Nomor PBB terbaru	Bayar PBB tertunggak	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		10/8/2023	Tidak ada	Tidak ada
90_PRM_2 023-08-10	10/8/2023	Mochamad Ali Ramdhan			Wiraswasta	Permohonan Salinas IMB, No SHGB : 491 No Sertifikat : 10.15.21.03.3.00491	Untuk Peningkatan Sertifikat Tanah/Rumah dari SHGB ke SHM	-	-	-	V	-	-	V	Ditolak	IMB yang diminta harus atas nama pemohon.		10/8/2023	Tidak ada	Tidak ada
91_PRM_2 023-08-12	12/8/2023	Ait Maman Sumarna			Wiraswasta	DPA Kota Bandung Tahun 2023	Pengetahuan	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		22/8/2023	Tidak ada	Tidak ada
92_PRM_2 023-08-14	14/08/2023	Hafiih Faathir Al Aziiz			Mahasiswa	LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 2017-2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung	Penelitian (Skripsi)	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	15/8/2023		Tidak ada	Tidak ada
93_PRM_2 023-08-15	15/08/2023	to chandra widjaja			Wiraswasta	pembuatan warkah di kelurahan cisaranten wetan /layanan pengaduan	pembaharuan warkah untuk pengurusan sertipikat hak milik	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		18/8/2023	Tidak ada	Tidak ada

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: September

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
97_PRM_2023-09-01	01/09/2023	ALYA GHAISANI AZZAHRA			Mahasiswa	LRA Kota Bandung 2016-2022 dan laporan rincian penerimaan pajak daerah 2012-2022	Kebutuhan penelitian skripsi "Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Bandung"	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	6/9/2023		Tidak ada	Tidak ada
100_PRM_2023-09-06	06/09/2023	Januar Herdian Mamora			Karyawan Swasta	Permohonan pdf kartu keluarga	Pendaftaran nomor ponsel	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		11/9/2023	Tidak ada	Tidak ada
101_PRM_2023-09-06	06/09/2023	Kiki Fitriyani			Perawat	Mengetahui status permohonan SIPP	untuk mengetahui status permohonan pembuatan SIPP	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		8/9/2023	Tidak ada	Tidak ada
103_PRM_2023-09-07	07/09/2023	Robi Rahmat syahdianto			Swasta	Saya memerlukan data pribadi saya yang telah tercatat di Disduk capil	Meng update data pribadi di ktp	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		8/9/2023	Tidak ada	Tidak ada
107_PRM_2023-09-14	14/09/2023	ARIS TOENING WINARNI			Swasta	Daftar lembaga peduli lingkungan	data penelitian	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		20/9/2023	Tidak ada	Tidak ada
108_PRM_2023-09-20	20/09/2023	Putri Adinda Rahmadhani			Mahasiswa	Daftar LSM/NGO di Kota Bandung	Riset Awal Penelitian Skripsi	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		24/9/2023	Tidak ada	Tidak ada
109_PRM_2023-09-22	22/09/2023	Sytha Febrianti Handayani			Swasta	Informasi mengenai masa ijin berlaku LED Display yang berlokasi di jalan Ahmad Yani No. 279 Rt 02 Rw 01 Kel Sukamaju Kec Cibeuying Kidul	Untuk menggunakan kembali LED Display	-	DPMPSTP	-	V	-	-	V	Diberikan	-	2/10/2023		Tidak ada	Tidak ada
110_PRM_2023-09-23	23/09/2023	ACHMAD SARHINDI			Pensiunan	Surat Keterangan Duda	Persyaratan ke Bank	-	Disdukcapil	-	V	-	-	V	Diberikan	-		27/9/23	Tidak ada	Tidak ada
111_PRM_2023-09-24	24/09/2023	YUNI INDAH			Pegawai swasta	Kartu keluarga	Untuk mengetahui data anggota keluarga yang ada di KK saya	-	Disdukcapil	-	V	-	-	V	Diberikan	-		27/9/23	Tidak ada	Tidak ada
112_PRM_2023-09-27	27/09/2023	Achmad Sarhindi			Pensiunan	Surat keterangan istri meninggalkan rumah sejak 2022	untuk syarat adminitrasi ke bank	-	Disdukcapil	-	V	-	-	V	Diberikan	-		27/9/23	Tidak ada	Tidak ada
113_PRM_2023-09-29	29/09/2023	Khoirunnisa			Mahasiswa	Dokumen terkait detail dan implementasi Program KangPisman Kota Bandung	Penelitian	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		6/10/2023	Tidak ada	Tidak ada

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: Oktober

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
114_PRJ_2023-10-02	02/10/2023	Raihan Fadhullah Rachmansyah			Mahasiswa	Informasi anak jalanan sebagai korban eksploitasi kemiskinan dalam peredaran narkoba di jalan pada Bulan Oktober tahun 2022 dan/atau yang terbaru di kota bandung	Untuk memenuhi Bahan dalam menyusun penelitian skripsi dengan judul "Penegakan Hukum terhadap tindak pidana narkoba pada anak jalanan dan perlindungan hukumnya"	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		5/10/23	Tidak ada	Tidak ada
115_PRJ_2023-10-04	04/10/2023	Ardi			Karyawan Swasta	Informasi mengenai Alur Permohonan Izin Usaha Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang	Untuk mengajukan Izin Usaha Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		13/10/23	Tidak ada	Tidak ada
116_PRJ_2023-10-05	05/10/2023	Lingga Permana			Pekerja Swasta	Surat akta kematian	untuk di print, pembaharuan kartu keluarga	-	Disdukcapil	-	V	-	-	V	Diberikan	-	25/10/23		Tidak ada	Tidak ada
117_PRJ_2023-10-05	05/10/2023	Dwi Kurniawan			Mahasiswa	Jumlah umkm tahu susu di kota bandung	Studi pendahuluan penelitian tesis	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		9/10/23	Tidak ada	Tidak ada
118_PRJ_2023-10-06	06/10/2023	Mohammad Azhariannel			Mahasiswa	Jumlah mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang ada dan berfungsi dari tahun 2014 hingga tahun 2022	Data ini akan sangat berguna bagi penelitian tugas akhir yang saya kerjakan	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		9/10/23	Tidak ada	Tidak ada
119_PRJ_2023-10-06	06/10/2023	Mohammad Azhariannel			Mahasiswa	Laporan pendapatan retribusi parkir Kota Bandung dari tahun 2014 hingga tahun 2022	Untuk digunakan sebagai data dalam penelitian tugas akhir saya	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		9/10/23	Tidak ada	Tidak ada
120_PRJ_2023-10-09	09/10/2023	Hartanti Sutendi			Pelajar	Data UMKM pengolahan ikan di Kota Bandung berdasarkan kecamatan	Data UMKM pengolahan ikan digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian skripsi yang akan Saya lakukan	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		10/10/23	Tidak ada	Tidak ada
121_PRJ_2023-10-09	09/10/2023	Denalis Rohaningsih			Peneliti	Data jenis-jenis industri di sekitar DAS Citarum Hulu (yang melalui Kota Bandung) selama 5 tahun terakhir: 2018-2023	Sebagai data sekunder/data dukung untuk penulisan artikel hasil riset di bidang lingkungan	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		10/10/23	Tidak ada	Tidak ada
122_PRJ_2023-10-09	09/10/2023	Prisco Ramadhan Prastiawan			Mahasiswa	Denah atau Site Plan Mal Pelayanan Publik Kota Bandung	Data dan Studi Kasus Tugas Akhir (Skripsi)	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		10/10/23	Tidak ada	Tidak ada
124_PRJ_2023-10-11	10/11/2023	Dwi Kurniawan			Mahasiswa	Jumlah UMKM Tahu Susu di kota bandung pada tahun 2022, dan 2023	penelitian tesis	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		13/10/23	Tidak ada	Tidak ada
125_PRJ_2023-10-11	10/11/2023	Anas Kurnia zuliarachman			Mahasiswa	Data diri pribadi	Untuk mengetahui informasi	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		13/10/23	Tidak ada	Tidak ada
133_PRJ_2023-10-19	19-10-2023	Firman muhammad ahyar			Swasta	Nomor rekam medis	Registrasi online rujukan	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		19/10/23	Tidak ada	Tidak ada

135_PRM_20 23-10-23	23-10-2023	IRMAWATI ROSAENI			mahasiswa	saya ingin mengetahui terkait file Opini BPK RI atas LKPD Bandung saat Tahun 2022	untuk mengetahui informasi tersebut	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	23/10/23		Tidak ada	Tidak ada
136_PRM_20 23-10-23	23-10-2023	Adam Prisma Winarta			Mahasiswa	1. Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Kelurahan di kecamatan Coblong tahun 2022. 2. Tingkat pendapatan masyarakat di kwcamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2022.	Penunjang Penelitian	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		23/10/23	Tidak ada	Tidak ada
137_PRM_20 23-10-23	23-10-2023	Winona Maheswari Ramadhan			Pegawai Swasta	Data UMK Kota Bandung di Tahun 2002. Apabila memungkinkan, saya membutuhkan data upah kerja minimum rata-rata secara spesifik untuk kriteria profesi buruh/tukang bangunan harian	Sebagai acuan perhitungan pembangunan rumah di tahun 2002, unfuk keperluan pembagian warisan	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	24/10/23		Tidak ada	Tidak ada
138_PRM_20 23-10-23	23-10-2023	Nurganda			Karyawan Swasta	Rute dan Jadwal TMB Kota Bandung	Ingin mengetahui	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	23/10/23		Tidak ada	Tidak ada
139_PRM_20 23-10-23	23-10-2023	Saraswatie Puteri			Pelajar/ Mahasiswa	PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	ingin mengetahui informasi tersebut	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	24/10/23		Tidak ada	Tidak ada
140_PRM_20 23-10-23	23-10-2023	Andra Barata Putra			Pegawai BUMN	Rute Bandung Tour On Bus (Bandros)	Untuk menggunakan fasilitas umum untuk pariwisata	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	24/10/23		Tidak ada	Tidak ada
141_PRM_20 23-10-23	23-10-2023	Firman Akbar Setiawan			Karyawan	Persyaratan perizinan mendirikan menara telekomunikasi	Ingin mengetahui persyaratannya	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	24/10/23		Tidak ada	Tidak ada
142_PRM_20 23-10-23	23-10-2023	Geovanca Arto			Karyawan Swasta / Mahasiswa	Jumlah WP dan Penerimaan PBB per Kelurahan di Kecamatan Bojongloa Kaler 2018-2022	Untuk penyusunan skripsi		-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		24/10/23	Tidak ada	Tidak ada
143_PRM_20 23-10-23	23-10-2023	Fadhilah Lintang Mustari			Mahasiswa	Jumlah pelaku bisnis online (e-commerce) kota bandung, beserta identitas dan jenis usahanya	Tugas Akhir / Skripsi		-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		24/10/23	Tidak ada	Tidak ada
144_PRM_20 23-10-24	24-10-2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Data Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif di Kota Bandung Tahun 2021 dan 2022	Untuk Data Penelitian Skripsi		-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		24/10/23	Tidak ada	Tidak ada
146_PRM_20 23-10-24	24-10-2023	Safri Syamli Azis			Mahasiswa	1. Aturan2/Regulasi/Dasar hukum 2. Struktur susunan organisasi BCC 3. Laporan kerja 112 selama tahun 2021 4. Panduan Pelaksanaan layanan	Data penelitian Skripsi		-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		24/10/23	Tidak ada	Tidak ada
150_PRM_20 23-10-24	24-10-2023	Raihan Putri			Swasta	Syarat izin pendirian PAUD	ingin mengetahui syarat-syarat pendirian PAUD, karena rencananya saya akan mendirikan PAUD	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	24/10/23		Tidak ada	Tidak ada
151_PRM_20 23-10-24	24-10-2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Data Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Bandung Tahun 2020, 2021 dan 2022	Penelitian Skripsi		-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		24/10/23	Tidak ada	Tidak ada
152_PRM_20 23-10-24	24-10-2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Kota Bandung Tahun 2021 dan 2022	Untuk Bukti Masalah		DPPKB	-	V	-	-	V	Diberikan	-	25/10/23		Tidak ada	Tidak ada
153_PRM_20 23-10-25	25-10-2023	Dwi Kurniawan			Mahasiswa	Data umkm tahu susu dikota bandung tahun 2022 dan 2023	Ijin penelitian		-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		25/10/23	Tidak ada	Tidak ada

154_PRM_20 23-10-25	25-10-2023	Dwi Kurniawan			Mahasiswa	Data umkm tahu susu dikota bandung tahun 2022 dan 2023	Ijin penelitian		-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		25/10/23	Tidak ada	Tidak ada
155_PRM_20 23-10-25	25-10-2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2020, 2021, 2022 di Kota Bandung	Untuk Mengetahui Masalah		DPPKB	-	V	-	-	V	Diberikan	-	31/10/23		Tidak ada	Tidak ada
156_PRM_20 23-10-25	25-10-2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Jumlah Kelahiran Anak Tahun 2020, 2021, 2022 di Kota Bandung	Untuk Mengetahui Masalah		Dinkes	-	V	-	-	V	Diberikan	-	31/10/23		Tidak ada	Tidak ada
157_PRM_20 23-10-25	25-10-2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2020, 2021, 2022	Untuk Mengetahui Masalah		Disdukcapil	-	V	-	-	V	Diberikan	-	27/10/23		Tidak ada	Tidak ada
158_PRM_20 23-10-27	27-10-2023	Salwa Aaliyah Koswara			Mahasiswa	Denah Perancangan Teras Sunda Cibiru 2018	Assalamualaikum, perkenalkan saya Salwa Aaliyah Koswara mahasiswa Desain Interior Telkom University. Saya meminta izin meminta denah untuk Tugas akhir saya, mohon bantuannya bapak/ibu, terima kasih.		-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		27/10/23	Tidak ada	Tidak ada
159_PRM_20 23-10-27	27-10-2023	Fina Syaidah			Mahasiswa	Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023	Untuk Penelitian Skripsi		-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		27/10/23	Tidak ada	Tidak ada
160_PRM_20 23-10-27	27-10-2023	Irfan Fauzan			Mahasiswa	LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2022 dan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2022	Tugas Kuliah		-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		30/10/23	Tidak ada	Tidak ada
161_PRM_20 23-10-30	30-10-2023	Sytha Febrianti Handayani			Swasta	Mebutuhkan informasi masa ijin berlaku LED display videotron yang berada di lahan kantor kami PT. Radio Ekacita Swara Buana yang beralamat di jl. Ahmad Yani No. 279 A Rt. 01 Rw. 02 Kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul (Perempatan jl. Ahmad dan jl. Supratman)	Mendapatkan kejelasan mengenai LED ini karena pihak vendor PT. IDEA selaku pemilik LED Videotron sudah 2 tahun tidak melakukan pembayaran sewa lahan dan kantornya sudah tidak bisa dihubungi		DPMPPTSP	-	V	-	-	V	Diberikan	-	2/11/23		Tidak ada	Tidak ada
162_PRM_20 23-10-31	31-10-2023	Willy Apriandy Nugraha			Swasta	Izin lembaga pelatihan kerja pemagangan ke jepang	untuk mendirikan lembaga pelatihan kerja pemagangan ke Jepang		Disnaker	-	V	-	-	V	Diberikan	-	2/11/23		Tidak ada	Tidak ada
163_PRM_20 23-10-31	31-10-2023	ARINDHINI AMALIA			Mahasiswa	Target capaian jumlah peserta keluarga berencana (KB) aktif di kota Bandung tahun 2020, 2021, 2022.	Mencari masalah			-	V	-	-	V	Diberikan	-	31/10/23		Tidak ada	Tidak ada
164_PRM_20 23-10-31	31-10-2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Jumlah Target Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif di kota Bandung Tahun 2020, 2021, 2022	sebagai bahan informasi mengenai target peserta kb kota bandung apakah tercapai atau tidak		DPPKB	-	V	-	-	V	Diberikan	-	10/11/23		Tidak ada	Tidak ada

176_PRM_2023-11-13	13/11/2023	Parluhutan Simanjuntak			Ketua Umum Aliansi	Karena keterbatasan karakter, rincian permohonan informasi dengan nomor: Kota Bdg.999/KIP-LK/BPP-APLJ/XI/2023 tanggal 09 November 2023, dikirimkan via email 10 Nov 2023, 08.47 ke : ppidutama.kotabandung2@gmail.com, ppidutama.kotabandung@gmail.com	Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi yang berkaitan dengan peran aktif Pemohon sebagai bagian dari masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial kontrolnya (Pasal 28 F UUD 1945, Pasal 4 UU No. 14/ 2008, Pasal 24 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, PP No. 71 Tahun 2000, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 8 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999).	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	24/11/2023	Tidak ada	Tidak ada
177_PRM_2023-11-15	15/11/2023	Dindin ferdian			Wiraswasta	Biodata penduduk warga negara indonesia	Untuk pembiayaan	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	15/11/2023	Tidak ada	Tidak ada
178_PRM_2023-11-17	17/11/2023	Rian Rahmat Apriadi			Pegawai Swasta	PDF surat keterangan Domisili Kelurahan PASANGGRAHAN	Untuk pengajuan kredit Rumah subsidi	-	Disdukcapil	-	V	-	-	V	Diberikan	-	30/11/2023	Tidak ada	Tidak ada
179_PRM_2023-11-18	18/11/2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Target dan Realisasi Jumlah keluarga yang mengakses PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) Saayunan BKKBN Jawa Barat Tahun 2020	Untuk mendapat info	-	-	-	V	-	-	V	Ditolak	Informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung	20/11/23	Tidak ada	Tidak ada
180_PRM_2023-11-20	20/11/2023	Dessy Amalia			PNS	Data kemiskinan dan feminisasi. Data jumlah masyarakat miskin yang berjenis kelamin perempuan. Knp data bisa naik atau turun?	data digunakan untuk membantu anak Saya yang bersekolah di Al irsyad Islamic School, Kelas XI jurusan IPS	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	20/11/23	Tidak ada	Tidak ada
181_PRM_2023-11-21	21/11/2023	Reynaldo Gualdi			Mahasiswa	Data Jumlah Ruang dagang, data jumlah pedagang, serta zona dagang pada Pasar Cicadas Bandung Trade Mall terbaru	ujuan penggunaan informasi sebagai data penyusunan penelitiabn dengan studi kasus Pasar Cicadas	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	21/11/23	Tidak ada	Tidak ada
182_PRM_2023-11-21	21/11/2023	Kinara Rafikansha Syahrindra			Mahasiswa	Bahan Pangan yang diimpor ke kota Bandung dari kota lain di Indonesia	Pengerjaan tugas pola lokasi dan struktur ruang dengan judul Pemenuhan Bahan Pangan di Kota Bandung dengan sistem kota jejaring	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	21/11/23	Tidak ada	Tidak ada
183_PRM_2023-11-22	22/11/2023	sudarjat			Pegawai Swasta	saya mau ganti KTP saya yang rusak, (hurup dan angka sudah tidak terbaca)	untuk memudahkan saya mendapatkan info cara mengganti ktp saya yang rusak	V	-	-	V		V	-	Diberikan	-	24/11/2023	Tidak ada	Tidak ada

184_PRM_202 3-11-23	23/11/2023	Marsya Rizkia Putri Herawan			Mahasiswa	Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandung	Sebagai dokumen pendukung dan sumber informasi untuk tugas akhir mata kuliah Perencanaan Sistem Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	23/11/23	Tidak ada	Tidak ada
185_PRM_20 23-11-23	23/11/2023	jesica			Mahasiswa	laporan data program Puspel PP di Kota Bandung terkait perkembangan program, rekap per kelurahan, dan kendala pelaksanaan program	laporan data program Puspel PP di Kota Bandung terkait perkembangan program, rekap per kelurahan, dan kendala pelaksanaan program	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	23/11/24	Tidak ada	Tidak ada
186_PRM_202 3-11-23	23/11/2023	jesica			Mahasiswa	laporan data program Puspel PP di Kota Bandung terkait perkembangan program, rekap per kelurahan, dan kendala pelaksanaan program	laporan data program Puspel PP di Kota Bandung terkait perkembangan program, rekap per kelurahan, dan kendala pelaksanaan program	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	24/11/23	Tidak ada	Tidak ada
187_PRM_20 23-11-27	27/11/2023	Ria Niari Nasution			Mahasiswa	Dokumen kinerja/laporan kinerja terbaru	Untuk melihat data kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	6/12/23	Tidak ada	Tidak ada
188_PRM_202 3-11-27	27/11/2023	Mochammad Najwan Hammam			Mahasiswa	a. Data kinerja Lalu Lintas Harian pada Jl Surapati, Jl Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Jl Pasteur Kota Bandung (Bulan Desember tahun 2022). b. Data Kecepatan Rata-Rata Kendaraan pada Jl Surapati, Jl Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Jl Pasteur Kota Bandung (Bulan Desember tahun 2022). c. Data Frekuensi Hambatan Samping pada Jl Surapati, Jl Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Jl Pasteur Kota Bandung (Bulan Desember tahun 2022). d. Data Geometrik Jalan pada Jl Surapati, Jl Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Jl Pasteur Kota Bandung.	Sebagai data sekunder dalam penelitian tugas akhir mahasiswa.	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	28/12/23	Tidak ada	Tidak ada

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Bulan: Desember

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen - tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
189_PRM_2023-12-02	2/12/2023	Octa Pardis Christian			Wiraswasta	Rekaman cctv borma cikutra 01 dan rekaman cctv borma cikutra 02 tanggal 24 november 2023 pada pukul 14.20 - 14.35 wib	untuk mengetahui keberadaan hewan periharaan saya (anjing) yang hilang pada tanggal 24 november 2023 pukul 14.20 - 14.35 wib	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		6/12/23	Tidak ada	Tidak ada
191_PRM_2023-12-06	6/12/2023	Octa Pardis Christian			Wiraswasta	Rekaman cctv borma cikutra 01 dan rekaman cctv borma cikutra 02 pada tanggal 24 november 2023 pukul 14.20 - 14.35	untuk mengetahui keberadaan hewan periharaan saya (anjing) yang hilang pada tanggal 24 november 2023 pukul 14.20 - 14.35 wib	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		8/12/2023	Tidak ada	Tidak ada
192_PRM_2023-12-11	11/12/2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Target dan realisasi jumlah keluarga yang mengakses Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Sauryunan oleh BKKBN Jawa barat tahun 2022	Untuk informasi masalah	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		11/12/23	Tidak ada	Tidak ada
193_PRM_2023-12-11	11/12/2023	Andreas Asranata			Karyawan	Surat Keterangan Pindah Rumah	Untuk membuat Kartu Keluarga di summarecon Bandung Gedebage	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		12/12/2023	Tidak ada	Tidak ada
194_PRM_2023-12-12	12/12/2023	Anisa Sofiani			Mahasiswa	Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan e-KTP di Kota Cimahi tahun 2018-2023	Untuk mengetahui fenomena masalah	-	-	-	V	-	-	V	Ditolak	Informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung		12/12/23	Tidak ada	Tidak ada
195_PRM_2023-12-12	12/12/2023	Muhammad Firman Nugraha			Mahasiswa	1. Rincian anggaran dari program Memberikan Pelayanan Keliling yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2018-2023, seperti berapa miliar atau ratusan juta yang dialokasikan untuk anggaran tersebut, dan dialokasikan untuk kebutuhan apa saja (apabila diperbolehkan)	1. Sebagai masyarakat ingin mencari tahu berapa banyak anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah, karena program MEPELING sangat bermanfaat dan sebagai penerima layanan juga ingin melihat pemerintah memberikan perhatian kepada program ini melalui anggarannya. Sayang sekali untuk APBD Kota Bandung tidak memberikan detail mengenai hal ini.	-	Disdukcapil	-	V	-	-	V	Diberikan	-		3/1/24	Tidak ada	Tidak ada

196_PRM_2023-12-12	12/12/2023	Mochamad Bachtiar			Mahasiswa	Informasi Terkait Penggunaan Transportasi Umum di Kota Bandung, Informasi Jumlah Kendaraan Umum dan Kendaraan Pribadi, Jumlah trayek seluruh jenis Transportasi Umum di Kota Bandung, Data terkait Tingkat Kemacetan Kota Bandung, masing masing data di atas dengan kurun waktu dari 2017-2022	Akan saya gunakan sebagai referensi pengerjaan penelitian dan perancang sistem informasi transportasi umum, guna untuk menyelesaikan tugas Skripsi S1 di Universitas Nasional Pasim, Kota Bandung	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		13/12/2023	Tidak ada	Tidak ada
197_PRM_2023-12-12	12/12/2023	Dejar Julian Komara			Mahasiswa	Permohonan Penelitian Ilmiah	Penelitian Ilmiah	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan			13/12/2023	Tidak ada	Tidak ada
198_PRM_2023-12-13	13/12/2023	Anisa Sofiani			Mahasiswa	Data target pencapaian pembuatan e-KTP di Disdukcapil kota Cimahi	Untuk mengetahui informasi	-	-	-	V	-	-	V	Ditolak	Informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung		14/12/23	Tidak ada	Tidak ada
199_PRM_2023-12-13	13/12/2023	Anisa Sofiani			Mahasiswa	Pengolahan data survei kepuasan masyarakat per responden dan per unsur pelayanan DISDUKCAPIL kota Cimahi tahun 2022-2023	Untuk mengetahui informasi yang menarik	-	-	-	V	-	-	V	Ditolak	Informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung		14/12/23	Tidak ada	Tidak ada
200_PRM_2023-12-14	14/12/2023	Reina Nurul Asphia			Mahasiswa	Data jumlah kendaraan dengan jenisnya yang lewat jalan diponegoro (melewati dinkes kota bandung) pada tanggal 3 september 2023, 21 oktober 2023 dan 26 november 2023	Kebutuhan penelitian tugas akhir terkait pemodelan pencemaran udara	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-		14/12/23	Tidak ada	Tidak ada
201_PRM_2023-12-14	14/12/2023	Anisa Sofiani			Mahasiswa	Data survei kepuasan masyarakat per orang dan per pelayanan tentang identitas kependudukan digital di Disdukcapil kota bandung tahun 2022-2023	Untuk mengetahui informasi baru	-	Disdukcapil	-	V	-	-	V	Diberikan	-	3/1/24		Tidak ada	Tidak ada
202_PRM_2023-12-14	14/12/2023	Vicky amalia			Swasta	Cetak KTP dan KK	Untuk data diri	-	Disdukcapil	-	V	-	-	V	Diberikan	-	3/1/24		Tidak ada	Tidak ada
203_PRM_2023-12-16	16/12/2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Jumlah kepala keluarga Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, 2021, 2022, 2023	Mengetahui jumlah populasi kepala keluarga di Jawa Barat	-	-	-	V	-	-	V	Ditolak	Informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung		3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
204_PRM_2023-12-16	16/12/2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Jumlah kepala keluarga Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, 2021, 2022, 2023	mengetahui jumlah keluarga sejahtera di jawa barat	-	-	-	V	-	-	V	Ditolak	Informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung		3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
205_PRM_2023-12-16	16/12/2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Jumlah kepala keluarga Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, 2021, 2022, 2023	untuk mengetahui jumlah keluarga yang rentan di jawa barat	-	-	-	V	-	-	V	Ditolak	Informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung		3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
206_PRM_2023-12-16	16/12/2023	Arindhini Amalia			Mahasiswa	Jumlah kepala keluarga Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, 2021, 2022, 2023	untuk mengatahui angka ketahanan keluarga di jawa barat	-	-	-	V	-	-	V	Ditolak	Informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandung		3/1/24	Tidak ada	Tidak ada

207_PRM_2023-12-18	18/12/2023	Angga Prasetya Permana			PNS	Kontak petugas humas / diskominfo Bandung	Studi tiru satker UPT kemensos dalam pemanfaatan teknologi informasi	V	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
208_PRM_2023-12-18	18/12/2023	Anisa Sofiani			Mahasiswa	Data Target pencapaian pengguna Identitas kependudukan digital di kota Bandung pada tahun 2022-2023	Untuk menambah wawasan pengetahuan	-	Disdukcapi	-	V	-	-	V	Diberikan	-	3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
209_PRM_2023-12-19	19/12/2023	Rizki Ahmad			Konsultan	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pembedayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	-	Bagian Hukum	-	V	-	-	V	Diberikan	-	3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
211_PRM_2023-12-21	21/12/2023	Nurhayati			mahasiswa	Meminta informasi terkait jumlah pasien tahun 2018 sampai 2022	untuk kebutuhan melengkapi data skripsi	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
213_PRM_2023-12-22	22/12/2023	Tumiari Septiani			Karyawan Swasta	Saya sudah membuat Surat Keterangan Kesalahan Ijasah dari SD. Namun, melihat dari situs bahwa persyaratan harus melengkapi SPTJM . Apakah ada formatnya ? saya minta dikirimkan via email apabila ada. Supaya ketika ke disdik loket, syaratnya sudah lengkap.	Untuk pengajuan perbaikan ijasah	-	Dinas Pendidikan	-	V	-	-	V	Diberikan	-	8/1/24	Tidak ada	Tidak ada
214_PRM_2023-12-23	23/12/2023	Muh. Fadli Nur			Perawat	Data 3bln terakhir BOR, TOI, LOS, angka kematian Kasar, Kunjungan pasien di RSUD Bandung Kiwari	Penelitian Manajemen Keperawatan	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-	3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
215_PRM_2023-12-24	24/12/2023	Ahmad Fauzan			Wartawan	- Daftar penyewa lahan Sekolah untuk resepsi pernikahan di SD 080 Bojong Indah Cibuntu, Jl. Kawat No. 1, Kel Caringin, Kec. Bandung Kulon, mulai Januari-Desember 2023. - Besaran sewa lahan untuk pernikahan di SD 080 Bojong Indah, Januari-Desember 2023. - Peruntukan biaya sewa lahan atau bangunan SD 080 Bojong Indah Januari-Desember 2023. - Peraturan atau Aturan mengenai penggunaan lahan sekolah untuk komersil atau resepsi pernikahan.	Sebagai dasar warga RW 05, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung kulon untuk menegakkan ketertipan, keamanan dan ketentraman warga. Karena acara musik di acara pernikahan di SD 080 Bojong Indah telah mengganggu kenyamanan warga.	-	Dinas Pendidikan	-	V	-	-	V	Diberikan	-	9/1/24	Tidak ada	Tidak ada

216_PRM_2023-12-27	27/12/2023	Medina Sania Subagdja			Mahasiswa	1. Renja MHHP 2022 2. Renja MHHP 2023 4. Data target IKM 2020-2023 5. Data realisasi IKM 2020-2023 (triwulan 3 atau sampai november) 6. Data target (standar) customer complain 2020-2023 7. Data realisasi (hasil lapangan) customer complain 2020-2023 (triwulan 3 atau sampai november) 8. Data target social media engagement 2020-2023 9. Data realisasi social media engagement 2020-2023 (triwulan 3 atau sampai november). Beserta cara perhitungannya	Sebagai data sekunder untuk penelitian/ skripsi saya	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-			3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
217_PRM_2023-12-27	27/12/2023	Muh. Fadli Nur			Perawat	Data insiden keperawatan pasien	Penelitian tesis	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-			3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
218_PRM_2023-12-27	27/12/2023	R. Aji Tigin			Wiraswasta	Siapa saja dan berapa yang mendapatkan fasilitas BBM ? Saya minta juga laporan data pengeluaran BBM perbulannya	Ingin mengetahui rincian anggaran dan kegunaannya	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-			3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
219_PRM_2023-12-27	27/12/2023	R. Aji Tigin			Wiraswasta	Saya meminta list barang milik daerah sekota Bandung	Ingin tau	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-			3/1/24	Tidak ada	Tidak ada
220_PRM_2023-12-28	28/12/2023	Rodlatul Salmah			Mahasiswa	Izin pengambilan data pada instalasi Radiologi cr scan	Untuk penelitian tugas akhir (skripsi)	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-			9/1/24	Tidak ada	Tidak ada
221_PRM_2023-12-28	28/12/2023	Rodlatul Salmah			Mahasiswa	Izin pengambilan data pada instalasi Radiologi cr scan	Untuk penelitian tugas akhir (skripsi)	-	-	-	V	-	-	V	Diberikan	-			9/1/24	Tidak ada	Tidak ada



Diskominfo
KOTA BANDUNG



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BANDUNG

JL.WASTUKENCANA NO.2 KOTA BANDUNG



PPID.Bandung.go.id



PPID LAPOR Kota Bandung



@PPIDKOtaBandung



@PPIDLaporkotabandung